

RASIONALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Rizki Muharlin Rayadi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The high of low realization regional revenues becomes the determining factor of regional expenditure. The large regional revenue capacity will affect the amount of local expenditure spelled out in regional programs and activities. This study aims to explain the Rationalization Revenue and Expenditure Budget of Siak District Year 2016 by analyzing and explaining how big the implications caused by the rationalization and what efforts have been made in overcoming these implications. For that in seeing, knowing and describing the actual situation in detail and actual by looking at the purpose of the study, the appropriate method used in this study is a qualitative research method with the source of research is informants taken by purposive sampling, literature, website and online media as well as data collection techniques by interview, documentation and observation. The results of this study show that the Rationalization Revenue and Expenditure Budget of Siak District Year 2016 brings negative implications that is with the delay and cancellation of the implementation of a number of programs or activities that have been planned and arranged in RKPD Siak District 2016 which has been described in the Work Plan SKPD Siak District Year 2016.

Abstrak: Realisasi tinggi rendahnya pendapatan daerah menjadi faktor penentu dari belanja daerah. Kapasitas pendapatan daerah yang besar akan berpengaruh pada besarnya belanja daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 dengan menganalisis dan menjelaskan seberapa besar implikasi yang ditimbulkan dengan adanya rasionalisasi tersebut dan apa saja upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi implikasi tersebut. Untuk itu dalam melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat tujuan penelitian tersebut, maka metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan sumber data penelitian yaitu informan yang diambil secara *purposive sampling*, literature, website dan media online serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 membawa implikasi negatif yaitu dengan adanya penundaan dan pembatalan pelaksanaan sejumlah program atau kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dalam RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016 yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD Kabupaten Siak Tahun 2016.

Kata Kunci: rasionalisasi, pendapatan daerah, belanja daerah

PENDAHULUAN

Penurunan harga minyak dunia secara otomatis berdampak pada penurunan pendapatan daerah penghasil minyak seperti Kabupaten Siak. Pada Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Siak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 sebesar Rp. 2,503 Triliun dengan catatan waktu itu harga minyak dunia US\$60 per barel. Pada Januari 2016 harga minyak dunia kembali mengalami penurunan menjadi US\$37 per barel. Kondisi ini otomatis berdampak pada penurunan pendapatan daerah dari sektor DBH Migas dimana setelah adanya penghitungan kembali APBD Perubahan (APBDP) yang disahkan Pemerintah Kabupaten Siak

bersama DPRD Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp.2,020 Triliun, berkurang sebesar Rp. 483 Miliar dari penghitungan APBD murni.

Penurunan pendapatan daerah tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Siak harus melakukan rasionalisasi APBD Tahun 2016. Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi secara proporsional jumlah pendapatan dengan jumlah belanja daerah yang akan dilaksanakan. Langkah rasionalisasi ini dinilai tepat namun juga telah membawa implikasi pada keberlangsungan pembangunan daerah yang terimplementasikan dalam belanja daerah, baik pada belanja langsung (belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah) maupun pada belanja tidak langsung (belanja yang

tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah).

Implikasi dari rasionalisasi APBD Kabupaten Siak pada sejumlah program-program pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam belanja langsung telah berdampak pada terhambatnya keberlangsungan pembangunan daerah yang secara otomatis merugikan masyarakat daerah, dimana program-program yang dapat menunjang aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat pada tahun 2016 tidak bisa direalisasikan. Tidak hanya itu selain implikasi pada belanja langsung, rasionalisasi APBD Kabupaten Siak tahun 2016 juga berimplikasi pada belanja tidak langsung (belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah).

Implikasi dari rasionalisasi APBD yang dapat dilihat dalam stabilitas belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung menunjukkan bahwa lemahnya manajemen pemerintahan daerah dalam mengatur keuangan daerah, sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bisa dikatakan kurang melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi persoalan defisit anggaran tahun 2016. Hal ini dibuktikan belum adanya upaya yang relevan yang dituangkan dalam bentuk program-program kerja dari Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengantisipasi persoalan ini. Terlihat sejak tahun 2015, program-program yang dijalankan pada tahun tersebut tidak mengarah pada program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti contohnya program penggalan potensi daerah selain Migas (perkebunan, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya).

METODE

Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Rasionalisasi Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan anggaran belanja daerah Kabupaten Siak tidak berbanding lurus dengan peningkatan anggaran pendapatan daerah, kemampuan riil pendapatan daerah pada beberapa tahun terakhir cenderung semakin menurun. Pada Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD Kabupaten Siak mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3,2 Triliun, sebagaimana dijelaskan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Siak dimana pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 sebesar Rp. 2,5 Triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 311,112 Miliar, Dana Perimbangan Rp. 2,075 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 204,9 Miliar.

Untuk tahun 2016, APBD Kabupaten Siak mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun anggaran 2015, APBD Kabupaten Siak tahun 2016 yang disahkan yaitu sebesar Rp. 2,503 Triliun dimana setelah adanya penghitungan kembali akibat realisasi penerimaan DBH Migas yang berkurang maka APBD Kabupaten Siak hanya bisa direalisasikan sebesar Rp. 2,020 Triliun atau berkurang sebesar Rp. 483 Miliar dalam APBD Tahun 2016. Penurunan ini selain disebabkan oleh realisasi penerimaan DBH Migas yang berkurang juga disebabkan oleh berkurangnya SILPA yang sebelumnya diprediksi sebesar Rp. 743 Miliar tapi setelah adanya penghitungan kembali, maka hanya bisa direalisasikan sebesar Rp. 57 Miliar karena realisasi fisik dan keuangan Kabupaten Siak tahun 2015 yang melebihi target yakni mencapai 91%.

Menindaklanjuti intruksi perampingan atau rasionalisasi anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Siak telah menggelar rapat efisiensi anggaran yang dilaksanakan di kantor Bupati Siak, rapat tersebut menghasilkan sebuah keputusan atau ke-

bijakan berupa pengurangan atau “pemangkasan” anggaran pada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak yang secara otomatis berimplikasi pada penundaan atau pembatalan sejumlah program kegiatan yang telah direncanakan pada setiap SKPD tersebut.

Rasionalisasi anggaran yang terjadi disetiap SKPD di Kabupaten Siak tidak hanya berimplikasi pada penundaan atau pembatalan program atau kegiatan yang ada pada SKPD tersebut, namun juga berimplikasi pada pengurangan anggaran operasional perkantornya, dimana setiap SKPD tidak lagi boleh menganggarkan uang makan pegawai yang dulunya boleh dianggarkan sebesar Rp. 17.000 per orang (Pegawai Negeri), belanja cetak penggandaan, serta pengurangan anggaran perjalanan dinas dan penundaan pembayaran dua bulan (November-Desember) tunjangan PNS yang sampai bulan Mei 2017 belum dibayarkan, bahkan rasionalisasi anggaran tersebut juga berimplikasi pada pengurangan tenaga honorer, tercatat ada 138 orang (53 Orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan 85 Orang dari Dinas Pendidikan) tenaga honorer yang sudah diberhentikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Rasionalisasi APBD

Upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengatasi rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 adalah bertujuan untuk meningkatkan atau memulihkan kondisi pendapatan daerah guna menghindari implikasi pada stagnasi pembangunan daerah tahun berikutnya yakni tahun anggaran 2017. Sebagaimana seperti halnya yang telah terjadi pada tahun anggaran 2016 dimana beberapa program pembangunan daerah tidak bisa direalisasikan akibat adanya penurunan pendapatan daerah. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan yang efektif dan efisien yang dinilai mampu memperbaiki kondisi tersebut agar pembangunan daerah Kabupaten Siak kedepannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana Perimbangan, 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Siak tahun 2016 untuk pendanaan pembangunan yang terus meningkat dari tahun sebelumnya diarahkan dalam Pengelolaan Keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Siak senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bermaksud untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari dana perimbangan yang berasal dari pusat. Untuk itu dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Siak tahun 2016, dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bersama DPRD Kabupaten Siak telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, dimana kebijakan baru ini dibuat untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah dari sisi retribusi dengan melakukan revisi beberapa pasal yang memuat tarif retribusi, misalnya perubahan pada tarif retribusi parkir kendaraan bermotor khususnya roda dua, yang mana pada peraturan daerah yang lama tarif retribusi parkir yang dikenakan yaitu sebesar Rp.1000, namun dengan adanya peraturan daerah yang baru maka tarif retribusi parkir kendaraan roda dua naik menjadi Rp. 2000.

Selama ini retribusi parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Siak belum dikelola secara maksimal, menurut keterangan Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Siak, untuk tahun 2015 sumbangan Retribusi Parkir terhadap APBD Kabupaten Siak hanya sebesar Rp.1,5 Juta perbulan atau Rp.18 Juta pertahun.

2. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan retribusi daerah serta melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal. Staf Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang menjelaskan bahwa setiap UPTD DPPKAD yang ada di Kecamatan diperintahkan oleh Kepala Dinas DPPKAD untuk mendata ulang seluruh objek pajak yang ada di Kecamatan, hal ini dilakukan dalam rangka mengejar target pendapatan daerah dengan memantau dan meneliti objek pajak baru. Menurut keterangan Kepala UPTD DPPKAD Kecamatan Tualang, pada tahun 2016 ada delapan objek pajak baru yang bisa dipungut pajaknya pada tahun depan (2017), dan ini nantinya akan dijalankan seiring dengan adanya surat keputusan tentang objek pajak dan wajib pajak daerah.
3. Peningkatan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Dana Bagi Hasil. Untuk peningkatan akurasi sumber daya alam, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersama DPRD Kabupaten Siak telah melakukan *hearing* dengan pimpinan PT. Bumi Siak Pusako sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang digelar di Bappeda pada Januari 2016, hasil dari pertemuan tersebut adalah DPRD Kabupaten Siak akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan guna meminta transparansi alokasi DBH dari pusat, dan kunjungan kerja ini baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dimana Kementerian Keuangan bersedia akan menghitung kembali pengalokasian nilai DBH yang akan disalurkan sesuai dengan proporsi daerah penghasil.
4. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan, dan membentuk pos pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kecamatan-kecamatan yang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
5. Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan aset dan keuangan daerah. Selama tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan daerah, salah satu upaya tersebut adalah memanfaatkan aset daerah. Dalam memanfaatkan aset daerah seperti lahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah membuka kerja sama dengan masyarakat, dimana masyarakat diberikan izin pinjam pakai lahan untuk kepentingan pertanian. Pada tahun 2016 lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dipinjamkan untuk kegiatan pertanian masyarakat adalah berjumlah 200 Hektar yang tersebar di beberapa kecamatan, dan telah menghasilkan beras sebagai produk baru daerah yang sudah diperkenalkan dan dipromosikan pada bulan Mei 2017 di Kecamatan Siak dengan nama produk "*Beras Siak Kota Istana*".
6. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting Migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi. Kunjungan DPRD Kabupaten Siak ke Kementerian Keuangan selain meminta transparansi perhitungan nilai DBH juga untuk mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan melibatkan pemerintah daerah secara menyeluruh dalam proses penetapan nilai lifting Migas yang menjadi dasar nilai jualnya. Menurut Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Siak, selama ini pemerintah daerah hanya menerima pembagian

- persentase DBH secara bulat tanpa tahu detail perhitungan pembagiannya.
7. Meningkatkan Deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengrevitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah antara lain melalui pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen atau nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan berlaku dan mampu bersaing.

Dengan kondisi keuangan daerah yang kurang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kondisi keuangan tersebut, salah satunya dengan mengrevitalisasi BUMD, yaitu dengan memangkas upah tenaga kontrak dan memberhentikan sementara tenaga kontrak yang dinilai kurang produktif. Sejauh ini menurut keterangan Kepala Bidang Kepegawaian PT. Bumi Siak Pusako, ada sekitar 150 tenaga kontrak yang sudah “dirumahkan”, dan bagi yang masih aktif akan direvitalisasi melalui pengurangan upah kerja yang sebelumnya tenaga kontrak mendapat upah kurang lebih sebesar Rp. 5 Juta perbulan sekarang menjadi Rp. 3,5 Juta perbulan.

Strategi Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Siak tahun 2016 memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Siak yang telah dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Siak tahun 2016, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016. Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 maka ditetapkan 6 (enam) prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2016 yang selanjutnya diimplementasikan kedalam program dan kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat;
2. Peningkatan Status Kecerdasan Masyarakat;
3. Pengembangan Perekonomian Daerah dan Ekonomi Kerakyatan;

4. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Daerah;
6. Reformasi Birokrasi dan Inisiasi Pelayanan Publik yang Prima.

Dengan kondisi keuangan daerah yang kurang baik, maka Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun 2016 telah mengambil beberapa alternatif kebijakan sebagai strategi untuk melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran yang dinilai mampu meminimalisir dampak dari defisit APBD dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan menghindari stagnasi pembangunan daerah.

Keseluruhan dari upaya Pemerintah Kabupaten Siak tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali setiap potensi yang ada di daerah, dengan adanya upaya tersebut hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mampu mengurangi ketergantungan pada DBH dari pemerintah pusat, setiap upaya yang dilakukan sejatinya bertujuan untuk menutupi celah fiskal yang diakibatkan oleh berkurangnya anggaran pendapatan pada salah satu sumber pendapatan daerah seperti DBH Migas.

Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Siak telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, namun upaya tersebut belum menunjukkan perubahan yang berarti, kuatnya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak pada dana perimbangan seperti DBH Migas selama ini berdampak pada kurang proaktifnya Pemerintah Kabupaten Siak dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, berbagai upaya yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 seperti intensifikasi dan ekstensifikasi belum bisa memperbaiki kondisi keuangan daerah. Terbukti APBD Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2017 tidak menunjukkan perubahan yang positif, bahkan merosot tajam dibandingkan tahun anggaran 2016, dimana APBD Kabupaten Siak yang disahkan untuk tahun anggaran 2017 yaitu hanya sebesar Rp. 1,6 Triliun, dan tentunya implikasi yang ditimbulkan pasti lebih besar jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

SIMPULAN

Turunnya nilai jual *lifting* Migas menyebabkan berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil Migas dari pusat kepada Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp.483 Miliar yang berdampak pada berkurangnya Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Siak dalam APBD Kabupaten Siak tahun 2016. Sebelumnya APBD Murni Kabupaten Siak Tahun 2016 disahkan sebesar Rp.2,503 Triliun, namun seiring dengan berkurangnya DBH Migas tersebut maka hanya bisa disahkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 2,020 Triliun. Dengan berkurangnya APBD Kabupaten Siak tahun 2016 tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melakukan rasionalisasi anggaran sebagai langkah untuk mengimbangi anggaran pendapatan daerah terhadap anggaran belanja daerah yang telah tersusun di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2016, namun demikian terdapat implikasi atas kebijakan rasionalisasi anggaran tersebut yaitu ditunda dan dibatalkannya sejumlah program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas, Badan dan Kantor yang merupakan penjabaran program atau kegiatan di dalam RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulrahman, W. (2016). Membangun Sinergitas Eksekutif dan Legislatif di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 2-10.
- Basuki, A. (2009). Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10(1), 43-49.
- Fikri, R. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Reformasi*, 5(2), 60-65.
- Keusuma, C. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 6-15.
- Kurniati, P. (2013). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 3(1), 5-11.
- Lisnawati. (2016). Dampak Penurunan Harga Minyak terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 08(1), 75-80.
- Novianto, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 04 (1), 17-19.
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(02), 8-12.
- Rahman, N. (2014). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 65-69.
- Rianto, A. (2012). Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 12(2), 470-480.
- Ruslin, I. (2013). Realisasi Ekonomi-Politik dalam Perspektif Dependencia. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 50-55.
- Setianingsih, B. (2015). Pengaruh Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1930-1936.
- Susanti, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 188-189.
- Sumadiasa, K. (2016). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(7), 935-941.
- Syahza, A. (2004). Dampak Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Siak. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 04(1), 91-98.
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 73-75.